

Sehingga keberadaan perpustakaan ditengah-tengah masyarakat, untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan mencerdaskan masyarakat, dirasa sangat penting.

Saat ini hampir disetiap Negara, Daerah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia, pada umumnya telah dibentuk perpustakaan-perpustakaan sebagai unit pelayanan informasi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah, yang juga memiliki perpustakaan umum daerah bernama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Jawa Barat, yang dibangun sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

layanan perpustakaan yang prima menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dan masyarakat diberikan akses seluas-luasnya terhadap informasi yang dimiliki perpustakaan umum Jawa Barat. Sebagaimana salah satu misi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah memberikan layanan prima kepada masyarakat dan menjadikan Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi perpustakaan rujukan bertaraf internasional, baik bagi perpustakaan-perpustakaan di lingkungan Provinsi Jawa Barat maupun perpustakaan lainnya.

Sebagai perpustakaan rujukan bertaraf Internasional, perpustakaan Dispusipda Jawa Barat dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan teknologi yang

canggih, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2013 Pasal 14 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan kebiasaan membaca dan belajar sebagai suatu proses yang berkesinambungan seumur hidup serta kesegaran jasmani dan rohani masyarakat berada dalam jangkauan layanan, sehingga berkembang daya kreasi dan inovasinya bagi peningkatan martabat dan produktivitas setiap warga masyarakat secara menyeluruh dalam menunjang pembangunan nasional, dan tujuan Tujuan Operasional Perpustakaan umm merupakan pernyataan formal yang terperinci tentang sasaran yang harus dicapai serta cara mencapainya, sehingga tujuan tersebut dapat dimonitor, diukur dan dievaluasi keberhasilannya. Adapun rincian dari pasal terkait Dari Pergub nomor 17 tahun 2011, sebagai berikut :

**Pasal Terkait dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
Tentang perpustakaan**

Pasal Terkait	Rincian
Hak : Pasal 5 ayat 1	Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan; a. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
Kewajiban : Pasal 6 ayat 1	Masyarakat berkewajiban: <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan; b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya; c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan

	<p>perpustakaan di lingkungannya;</p> <p>d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan</p> <p>e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.</p>
<p>Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban: Pasal 8</p>	<p>Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:</p> <p>a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;</p> <p>b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;</p> <p>c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;</p> <p>d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;</p> <p>e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;</p>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendorong budaya literasi di semua level masyarakat. Salah satu bentuk komitmen tersebut tertuang dalam Deklarasi Literasi untuk Jawa Barat Juara Lahir dan Batin salah satunya program Kotak Literasi Cerdas. Jawa Barat sedang meningkatkan indeks literasi. Ini menunjukkan komitmen di level teknis kita sangat kuat, bukan hanya basa-basi atau sekedar seremoni saja. Kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil se usai penandatanganan Deklarasi Literasi. isi dari deklarasi tersebut yaitu: Siap mendukung gerakan literasi untuk Jawa Barat Juara Lahir Batin, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kedua, menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar masyarakat sepanjang

hayat, dengan prinsip terbuka, menyenangkan, dan menjunjung kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat Jawa Barat, dalam meningkatkan kualitas hidupnya, melalui program transformasi, perpustakaan berbasis inklusi sosial di Jawa Barat. Ketiga, sesuai dengan kewenangan kami masing-masing mendukung gerakan literasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat literat yang berkarakter dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Keempat, membangun kolaborasi untuk melakukan inovasi kreasi literasi dalam mewujudkan masyarakat cerdas. Tuntutan tersebut dikarenakan pelayanan secara manual yang diterapkan di Dispusipda Jawa Barat mengalami berbagai kendala yang dapat menghambat pelayanan perpustakaan, permasalahan tersebut diantaranya :

1. Pemustaka harus antri cukup panjang untuk menunggu dilayani petugas saat peminjaman koleksi;
2. Jumlah petugas layanan yang terbatas menjadikan kesibukan yang tiada henti dalam melayani pemustaka di meja peminjaman;
3. Antrian yang panjang di meja layanan peminjaman membuat suasana yang tidak menyenangkan bagi pemustaka dan petugas;

Selain itu, permasalahan lain juga ditunjukkan dengan adanya tabel durasi waktu pelayanan perpustakaan secara manual, yang dianggap menjadi keluhan pustakawan atau petugas perpustakaan maupun pengunjung perpustakaan yang

juga menghambat pelayanan perpustakaan umum daerah Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Durasi Waktu Pelayanan Perpustakaan Dispusipda Jawa Barat
Secara Manual

No.	Jenis Pelayanan	Waktu Menunggu (Menit)
1	Peminjaman Koleksi	5-20
2	Pengembalian Koleksi	5-15
3	Pendaftaran Anggota	10-30
4	Pengisian Buku Tamu	1-5

Sumber : Dipusipda Jawa Barat 2017

Dari tabel di atas, nampak jelas bahwa pelayanan perpustakaan secara manual memakan banyak waktu, sehingga Dispusipda Jawa Barat dianggap perlu melakukan inovasi pelayanan atau membuat program-program baru yang membantu masyarakat dalam membangun minat baca dan kemudahan masyarakat dalam mengakses buku yang dibutuhkan

Sebagai wujud aksi nyata Pemerintah Jawa Barat dalam meningkatkan minat baca masyarakat, pada tanggal 15 Desember 2018 melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Jawa Barat telah meluncurkan program KOLECER (Kotak Literasi Cerdas) . Program tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, dengan program KOLECER yaitu perpustakaan mini yang akan dipasang di jalur-jalur atau pusat kota bisa disebut dengan street library tujuannya yaitu dapat menjadi wadah untuk mempermudah masyarakat Jawa Barat untuk mengakses buku tanpa harus ke perpustakaan umum. Program K Dalam program Kolecer dalam teknisnya pengelolaannya diserahkan kepada

Dinas Perpustakaan baik tingkat Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan. Dan ke depannya akan diperluas tidak hanya di tingkat kecamatan tetapi sampai ke tataran kelurahan, Rukun Warga (RW) sampai tataran Rumah Tangga (RT).

Adapun kegiatan yang sudah terlaksana adalah program Kolecer sudah berjalan namun belum merata hanya di beberapa kota dan tempat-tempat yang di pilih sangat strategis di pusat kota atau di tempat yang menjadi pusat berkumpul masyarakat, buku yang ada menjamin atau mencukupi untuk pengunjung yang datang, masyarakat bias meminjam buku untuk sekedar membaca di tempat dan buku yang disediakan mencakup untuk semua kalangan. Namun , ada juga kegiatan yang belum terlaksana yaitu untuk program kolecer yang belum dilaksanakan adalah kurangnya pemeliharaan dari pemerintah sekitar dan kurangnya penjagaan/ pengawasan. Fenomena pendukung yang membuat program kolecer belum efektif di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Kotak literasi yang terdapat di kota Bandung letaknya di Taman Jomlo terjadi aksi vandalisme, keadaan sangat kotor dan kurangnya pengawasan dari pemerintah sekitar.
2. Kotak literasi yang terdapat dialun-alun sukabumi sangat memprihatikan, yang seharusnya di dalam kotak terdapat buku-buku tetapi kenyataanya terdapat sampah dan baju bekas yang di buang oleh orang tidak bertanggung jawab.

3. Kotak literasi yang terdapat di area Pemkab Purwakarta di buka setiap saat walaupun kondisi dan buku di dalamnya lengkap namun di jam-jam tertentu tempat tersebut di kunci oleh penjaganya.

Tabel 1.3.
Program KOLECER yang sudah terlaksana di berbagai tempat

Kota	Letak	Kondisi	Ket.
Bandung	Jalan Braga	Baik	Dapat digunakan, dan terawat.
Bandung	Taman Jomlo	Rusak	Tidak dapat di gunakan, buku di curi dan tempat di coret-core.
Purwakarta	Area Pemkab	Baik	Dapat digunakan, dan terawat.
Sukabumi	Alun-Alun Kota	Rusak	Tidak terawat, terdapat sampah dan baju bekas di dalamnya
Pangandaran	Area Pemkab	Baik	Dapat digunakan, dan terawat.
Tasikmalaya	Alun-alun Kota	Rusak	Tidak terawat, dan jarang dikunjungi
Bogor	Area Pemkot	Baik	Dapat digunakan, dan terawat.

Terkait implementasinya, Pemda provinsi Jawa Barat akan memberikan rak buku Kolecer di berbagai lokasi untuk menyediakan bahan bacaan bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang patut dipuji, mengingat pentingnya

membaca bagi keluarga dan masyarakat. Program ini harus terus diperluas sehingga terjadi peningkatan akses dan pemerataan program kolecer di seluruh wilayah. Dan setelah akses dan pemerataan rak kolecer, maka yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan mutu buku sebagai bahan bacaan. Program kolecer harus diimbangi dengan peningkatan mutu bahan bacaannya.

Maka dibutuhkan buku-buku baru dengan konten yang lebih adaptif dengan perubahan. Buku buku yang relevan dengan tuntutan ilmu pengetahuan di era terkini. Maka pemerintah daerah Jawa Barat sangat layak memprioritaskan peningkatan mutu bahan baca dengan menganggarkannya dalam APBD. Bila tahun ini belum mendapat anggaran, sebagai pemerintah yang memiliki hak sebagai regulator, seharusnya ini bukan sebuah kendala. Pemerintah bisa mudah meminta berbagai swasta dan perusahaan untuk turut peduli mencerdaskan bangsa. Keberhasilan program memang tidak bisa berdiri sendiri. Maka keterbatasan bisa diatasi dengan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Semakin banyak pihak maka akan semakin baik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai pelaksanaan Program Kolecer (kotak literasi cerdas) yang sudah berjalan dalam satu tahun kebelakan. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan ke dalam skripsi yang berjudul : **Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Kotak Literasi Cerdas Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Kotak Literasi Cerdas Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan : Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Kotak Literasi Cerdas Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya : Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Kotak Literasi Cerdas Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Masalah-masalah yang berkenaan dengan pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Kotak Literasi Cerdas Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat menuntut pemecahan yang

ditangani secara serius dan profesional, baik oleh perangkat organisasi, termasuk juga oleh mereka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yang hasilnya akan berpulang kepada mereka untuk digunakan sebagai tolok ukur, baik secara teoritis maupun secara praktis. Demikian pun bagi pihak lain, terutama yang memerankan tugas pokok dan fungsinya seperti sumber data dalam penelitian ini. Sederhananya kegunaan yang diharapkan itu, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, segala ketentuan yang menyangkut Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Kotak Literasi Cerdas Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat dan gambaran yang lebih konkrit dalam pengembangan ilmu pemerintahan dihadirkan lewat beberapa teori yang mendasari penelitian ini, dapat digunakan sebagai tolok ukur guna memperbaiki hal-hal yang kurang dan tidak baik, khususnya yang dirasakan oleh sumber data, umumnya bagi pembaca.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan evaluasi terhadap efektivitas program kotak literasi cerdas pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat.